

## PENGGUNAAN NEW MEDIA SEBAGAI SARANA KAMPANYE POLITIK PADA KONTESTASI PILKADA JABAR 2018

Afdal Makkuraga Putra

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta

afdalmakkuraga@gmail.com

***Abstract.** Today the use of new media as a means of political campaign is increasingly prevalent. The presence of various types of internet features allows the public to be further involved in the process of selecting or making public decisions. The application of new media in the political world is seen as being able to fully realize the concept of public sphere. The study examines whether the use of new media as a means of campaigning in the West Java Governor elections in 2018 was able to encourage the realization of deliberative democracy that capture broader and more active citizen participation through the Internet, mobile communications, and other technologies in a democratic system. This study uses a non-critical discourse analysis methodology to see the pattern of issues presented by each candidate by using new media criteria such as interconnectivity and interactive. The results of the study show that campaigns using social media are seen as more effective than conventional media. This is because people believe more in the words of friends or colleagues they know on social media.*

**Abstrak.** Dewasa ini penggunaa media baru (new media) sebagai sarana kampanye politik makin marak. Kehadiran berbagai macam fitur internet memungkinkan publik untuk terlibat lebih jauh dalam proses pemilihan atau pengambilan keputusan publik. Pengaplikasian new media dalam dunia politik dipandang dapat mewujudkan konsep ruang public (public sphere) seutuhnya. Penelitian mengkaji apakah penggunaan new media sebagai sarana kampanye pada Pilkada Gubernur Jawa Barat Jawa 2018 mampu mendorong terwujudnya demokrasi yang deliberatif, yakni menjaring partisipasi warga yang lebih luas dan lebih aktif melalui Internet, komunikasi mobile, dan teknologi lainnya dalam sistem demokrasi. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis wacana nonkritis untuk melihat pola isu yang disampaikan oleh masing-masing kandidat dengan menggunakan kriteria media baru seperti adanya interkonektifitas dan interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye menggunakan media sosial dipandang lebih efektif ketimbang media konvensional. Hal ini disebabkan orang lebih percaya pada perkataan teman atau kolega yang mereka kenal di media sosial.

### PENDAHULUAN

Tahun 2018 boleh dikatakan tahun politik di Indonesia, betapa tidak 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Pilkada tahun 2017 menjadi Pilkada yang penuh dengan penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye. Bila tahun 1997 pemilihan hanya menggunakan website 2.0 sebagai sarana kampanye kini makin berkembang dengan penggunaan berbagai jenis media sosial

seperti facebook, twitter, youtube dan instagram.

Pengaplikasian *new media* dalam dunia politik diharapkan memperkaya kualitas partisipasi politik itu sendiri. Kehadiran berbagai macam fitur-fitur di internet memungkinkan publik untuk terlibat lebih jauh dalam proses pemilihan atau pengambilan keputusan public. Oleh karena itu sebagian pakar percaya bahwa pengaplikasian new media dalam dunia politik dapat mewujudkan konsep ruang

public (public sphere) seutuhnya seperti yang dicita-citakan oleh Jurgen Habermas.

Habermas seperti yang dikutip F. Budi Hardiman (2010) mengharapkan ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Ruang publik itu harus mudah diakses semua orang.

Tak heran kemudian McQuail (2005) menaruh harapan besar lahirnya partisipasi politik yang utuh, oleh karena itu kata McQuail media baru secara luas disambut sebagai cara yang potensial untuk lari dari politik "top-down" yang operesif dari demokrasi massa, dimana partai politik yang teroganisir secara ketat membuat kebijakan secara sepihak dan memobilisasi dukungan.

Lanjut McQuail menyatakan (2005) media baru (seperti yang fitur disediakan oleh facebook, twitter, youtube dan instagram) menyediakan informasi publik yang sangat beragam dan banyak, akses yang tidak terbatas bagi semua sehingga memungkinkan dialog langsung antara pengurus partai dengan pengikutnya. Dialog yang berlangsung pun berjalan bebas karena kontrol aparaturnegara hampir tidak ada. Dengan demikian cita-cita akan demokrasi yang diliberatif bisa terwujud.

Penelitian ini bermaksud menguji apakah penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye sudah mampu menciptakan praktek demokrasi yang deliberatif pada proses Pilkada Gubernur

di Jawa Barat? Untuk itu peneliti ini akan mengkaji media sosial (facebook, twitter dan instagram) yang dibangun oleh kandidat pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Jawa Barat dipilih karena merupakan salah satu barometer demokrasi di Indonesia. Jawa Barat merupakan provinsi dimana pragmentasi politik sangat cair dan dinamis. di Jawa Barat terdapat empat pasangan calon dengan tiga peta koalisi partai. Yakni Nasional Demokrat (Nasional Demokrat), Hanura, PKB dan PPP mendukung pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Gerindra, PKS dan PAN mendukung pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Demokrat-Golkar mendukung pasangan Dedy Miswar-Dedi Mulyadi. PDI tanpa koalisi memajukan pasangan TB Hasanuddin-Anton Chrilayan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana non kritis dengan observasi teks. Objek penelitian adalah media sosial masing-masing kandidat. Tujuan penggunaan analisis wacana ini adalah untuk mengetahui tentang isu-isu yang dibangun kandidat, metode penyampaian visi misi kandidat, dan teknik komunikasi politik yang digunakan oleh kandidat.

### **State of The Art**

Penelitian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia bukan lagi hal baru, berbagai penelitian telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan berbagai sudut pandang. Salah satu yang pernah diteliti di Pilkada adalah aspek komunikasi politik dari sisi penggunaan new media. Penelitian penulis sebelumnya (Putra, 2005) tentang Pilkada di Daerah Pemekaran, studi kasus Pilkada Kabupaten Kaur, Bengkulu tahun 2004, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah pada akhirnya menjadi arena pertarungan elit-elit lokal memperebutkan kekuasaan. Pilkada menjadi pintu yang terlegitimasi namun bila ada pihak yang

kalah maka ia berbuat anarkis seperti yang terjadi di Kab Kaur, tahun 2005.

Penelitian penulis (Putra, 2008) lainnya tentang Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 yang berjudul Etika dan Iklan Politik Pada Pilkada DKI tahun 2007 menunjukkan bahwa para kandidat Gubernur DKI Jakarta 2007 (Fauzi Bowo dan Adang Dorijatun) menerapkan segala upaya pemasaran politik (*political marketing*) dalam memenangkan persaingan menuju Gubernur DKI Jakarta. Salah satu yang mengemuka adalah masing-masing kandidat berusaha mendongkakan citra dan popularitasnya melalui Iklan-iklan politik di televisi. Kandidat percaya nampaknya bahwa citra dan popularitas terbukti menjadi andalan utama dalam memenangkan Pilkada.

Bagi calon yang memiliki popularitas tinggi niscaya dapat memenangkan Pilkada. Tetapi penggunaan iklan politik tersebut, alih-alih mendongkakan popularitas, bahkan masing-masing kandidat terjebak persaingan untuk memenangkan Pilkada dari pada membangun iklim politik dan demokrasi yang sehat. Kondisi ini sesungguhnya dikhawatirkan akan makin menjauhkan dari substansi komunikasi politik itu sendiri. Ditemukan bahwa terjadi krisis etika dalam iklan-iklan Pilkada DKI, yakni; *buying acces to voter*, lebih mengedepankan citra dari pada program (isu) dan penyederhanaan logika politik (*oversimplivication of political argumentation*).

Penelitian penulis lainnya (Putra, 2011) tentang Penggunaan New Media pada Pilkada Banten tahun 2011 menemukan bahwa tiga pasangan kandidat gubernur-wakil gubernur (Ratu Atut Choisyah-Rano Karno, Jazuli Juwaini-Ahmad Zakki, dan Wahidin Halim-) menggunakan website resmi dan jejaring sosial namun sayang sekali tidak bersifat interaktif. Para kandidat hanya ingin menginformasikan namun belum mendorong agar pengunjung/warga negara menyampaikan pandangan dan aspirasinya

dan kemudian berinteraksi sehingga terkesan satu arah. Hal itu menunjukkan bahwa para kandidat menghinati sifat media baru itu sendiri, yaitu interaktif.

Diana C. Mutz (2001) menyarankan penelitian komunikasi politik akan dan harus bergerak ke arah penekanan kembali pada konseptualisasi warga negara sebagai pengumpul yang aktif dan prosesor informasi. penekanan pada warga negara sebagai prosesor aktif informasi dan bukannya semata-mata sebagai penerima pasif—benar-benar merupakan tema lama dalam penelitian komunikasi. Kent Brants (2005) mengemukakan bahwa Internet bukan hanya merupakan medium baru komunikasi yang menawarkan jalan untuk memperoleh informasi secara cepat, tetapi bahkan telah menjadi revolusi karakter masyarakat yang demokratis yang dapat melampaui batasan ruang dan waktu, dan dapat mengakses secara interaktif dan bebas melebihi karakter media masa yang bersifat tradisional. Internet dapat mendorong warga menjadi pengumpul informasi yang aktif sekaligus menjadi prosesor informasi

### Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan konsep-konsep e-domokrasi sebagai landsan teori yang dikaji. Asal mula demokrasi sebagai suatu system politik dapat ditelusuri ke belakang, yaitu sebelum abad ke-5 M ketika Yunani menciptakan *the polis (the city-state atau the city-community)*, dan mencoba menjawab pertanyaan: bagaimana seharusnya sebuah system politik diorganisasikan guna memenuhi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Secara terminology kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* yang bermakna rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti yang berarti kekuasaan, jadi kata demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa (*government by the people*). Meskipun kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi susah untuk diimplementasikan.

Menurut Larry Diamond dalam Zuhro, dkk (2009:14) ada tiga asumsi umum yang lekat dengan konsep demokrasi. Pertama, demokrasi tidak hanya penting dan mungkin merupakan bentuk terbaik pemerintahan yang bisa diciptakan, melainkan juga suatu doktrin politik yang menguntungkan banyak negara. Asumsi ini tidak hanya didukung oleh AS, melainkan juga beberapa negara Eropa Barat lainnya yang memproklamasikan dirinya sebagai model demokrasi modern.

Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan memiliki sejarah panjang, berakar dalam sejarah Yunani kuno. Sebagai bentuk yang ideal, meskipun mungkin bukan sebagai suatu sistem, demokrasi bertahan melalui lingkungan politik yang tidak ramah. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang natural/alami sehingga bila orang di negara manapun memenangkan kebebasan untuk memilih sistem politiknya, mereka akan memilih demokrasi.

Meskipun demikian, asumsi tersebut di atas masih diperdebatkan. Dalam kenyataannya, terdapat perbedaan dalam mempraktikkan demokrasi dari suatu negara ke negara lainnya. Sebagai akibatnya, mendefinisikan demokrasi tidaklah mudah dan sederhana. Sebagai contoh, suatu negara mungkin dipandang demokratis bila negara tersebut memiliki parlemen, sistem partai, dan pemilu. Kalau ciri-ciri tersebut digunakan untuk menilai demokrasi suatu negara, akan banyak negara yang mengklaim dirinya demokratis. Menurut Rosenberg seperti yang dikutip Zuhro (2009), negara yang demokratis adalah suatu negara yang di dalamnya ada *the democratic movement rules*. Meskipun demikian, kiranya harus pula dibedakan antara bentuk dan substansi. Sebab, ada suatu negara yang memiliki lembaga politik demokratis, sementara sikap yang ditunjukkannya adalah otoritarian atau anti-demokrasi.

Feith seperti yang dikutip Zuhro (2009) berpendapat bahwa tuntutan

prinsip demokrasi adalah kebebasan individu dan kelompok untuk mengontrol negara. Demokrasi menurutnya merupakan suatu rangkaian kelembagaan yang membuat pemerintah *legitimate* dalam masyarakat dimana sebagian besar rakyat dipengaruhi ideologi (liberalisme, sosialisme, nasionalisme, feminisme dan lingkungan) demokrasi modern. Lebih jauh Feith dalam Meriam Budiardjo (2010) mengatakan bahwa munculnya kembali demokratisasi berkenaan dengan industrialisasi dan ekonomi, politik dan transformasi sosial. Pada saat yang berpendidikan dan meluasnya media massa serta bangkitnya kelas bisnis, profesional, dan buruh.

Selain itu, demokrasi juga dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau sistem politik yang ideal dan bahkan nyaris 'sempurna'. Akan tetapi, demokrasi sebenarnya juga terkait dengan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral. Oleh karena itu, demokrasi juga mengandung nilai-nilai (*values*) tertentu yang dianggap baik oleh masyarakat.

Menurut Henry B. Mayo seperti yang dikutip Meriam Budiardjo (2010:105), demokrasi mencakup beberapa norma atau nilai, yaitu: penyelesaian perselisihan secara damai dan melembaga; terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; pergantian pimpinan secara teratur; pembatasan pemakaian kekerasan (paksaan) secara minimum; pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman serta jaminan penegakan keadilan.

Sedangkan Robert A. Dahl seperti yang dikutip Meriam Budiardjo (2010) mengajukan lima kriteria demokrasi, yakni; persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian

terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan; kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda yang harus dan tidak harus diputuskan melalui pemerintahan; dan terliputnya masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Selanjutnya, Andrews dan Chapman (Zuhro, 2009) mengemukakan enam ciri demokrasi, yaitu hak suara yang luas; pemelihan umum yang bebas dan terbuka; kebebasan berbicara dan berkumpul; penghargaan atas *rule of law*; pemerintahan yang bergantung pada parlemen; dan badan pengadilan yang bebas.

Media baru (bahasa Inggris: *new media*) merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari media yang sangat merepresentasikan media baru adalah internet. Media baru menurut Mc, Quail (2005: 141-1430) adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri yang sama yang mana selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediannya yang luas untuk penggunaan peribadi sebagai alat komunikasi.

Adapun istilah E-Demokrasi sebenarnya adalah penggunaan media baru dalam ranah politik. Penggunaan media baru tersebut dianggap dapat memperkaya partisipasi warga dalam sosialisasi politik, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh parlemen, dapat melibatkan warga lebih dalam karena ases akan informasi juga diketahui oleh warga, demikian juga bahwa akses warga untuk berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan juga semakin terbuka, cepat dan murah.

Sementara menurut Thomas Zittel (2004) E-demokrasi sering dikaitkan dengan pemanfaatan website oleh partai politik, lembaga eksekutif, eksekutif dan legislatif, pemugutan suara secara

elektronik, mengirim email ke perwakilan politik dan diskusi-diskusi politik melalui internet serta pelayanan public melalui internet.

E-demokrasi senantiasa berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melibatkan warga untuk mendukung proses pengambilan keputusan demokratis dan memperkuat demokrasi perwakilan. E-demokrasi bertujuan untuk menjangkau partisipasi warga yang lebih luas dan lebih aktif melalui Internet, komunikasi mobile, dan teknologi lainnya dalam sistem demokrasi. Penelitian Rutger University mengatakan bahwa pesan-pesan politik di website memiliki kontribusi pada demokrasi langsung yang lebih partisipatoris (Barber dalam Linda Lee Kaid, 2004). Mengapa ia memiliki potensi itu karena:

1. Melakatnya sifat interaktivitas pada internet
2. Potensial untuk komunikasi yang lateral dan horizontal
3. Point to point komunikasi
4. Berbiaya murah
5. Sebagai medium komunikasi yang cepat
6. Hilang atau berkurangnya batas-batas nasional
7. Bebas dari Campur tangan

## HASIL PENELITIAN

Pilkada Jabar juga ditandai dengan makin maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye. Pilkada ini semakin terasa bedanya dengan Pilkada tahun 2005 ketika Pilkada digelar pertama kali. Pilkada sebelum tahun 2010 masih kental diwarnai dengan iklan politik di televisi, pasca 2010 kampanye politik bergeser ke dunia maya. Berikut ini adalah penjelasan analisis penggunaan media sosial pada masing-masing kandidat.

**Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.** Pasangan ini didukung oleh empat partai politik yakni Partai Peraatuan Pembangunan (PPP) dengan 9 kursi di DPRD Jabar, Partai Kebangkitan Bangsa 7 kursi, Partai Nasional Demokrat 5 Kursi

dan Hanura 3 kursi. Partai pendukung Ridwan Kamil bukanlah partai besar. Nasdem dan Hanura adalah partai yang lahir pasca 2004. Hanya PPP yang merupakan partai yang lahir di era Orde Baru.

Ridwan Kamil maju ke palagan Pilkada Jabar dengan modal sosial yang kuat. Ia adalah mantan Walikota Bandung dengan segudang prestasi. Usia masih tergolong muda dengan memiliki karakter leadership yang kuat. Biasa dipanggil kang Emil atau Ridwan lahir di Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober 1971. Ridwan Kamil adalah putra dari pasangan Dr. Atje Misbach, S.H dan Dra. Tjutju Sukaesih. Dia anak kedua dari lima bersaudara.

Sejak kecil Ridwan kamil dikenal sebagai anak yang cerdas dan aktif. Ia adalah sosok perkerja keras dan pantang menyerah. Gelar entrepreneur sukses layak diraihnya, semasa kecil ia sudah bisa menjual es mambo buatan tangannya sendiri dan untung besar. Ridwan Kamil menghabiskan masa sekolahnya di kota kembang Bandung. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Bandung. Ia sekolah di SDN Banjarsari III, SMPN 2, SMAN 3, dan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung. Ia resmi mendapat gelar insinyur pada usia 24 tahun dari jurusan arsitek ITB.

Semasa kuliah, dia aktif dalam kelompok-kelompok mahasiswa dan unit kegiatan seni kampus. Bahkan saat kuliah, ia sudah tidak bergantung kepada kedua orang tuanya karena ingin hidup mandiri. Apalagi saat meneruskan kuliah S2 ke University of California, Berkeley, Amerika Serikat, hanya bantuan beasiswa untuk menopang kuliahnya. Pada tahun 2004, Ridwan Kamil mendirikan Urbane, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitek, dan desain. Urbane ini adalah firma yang didirikan oleh Ridwan Kamil dan teman-temannya, Achmad D. Tardiyana, Reza Nurtjahja, dan Irvan W. Darwis. Nama Ridwan Kamil menjadi terkenal sebagai arsitektur yang penuh kreasi. Alhasil,

beragam penghargaan mengenai desain ia gondolnya.

Selain itu, karier Ridwan Kamil juga sebagai seorang dosen di ITB. Selain karier dan namanya makin dikenal publik Bandung, ia memiliki kepedulian yang kuat akan kemajuan Kota Bandung. Pada tahun 2013, ia bertarung di Pilkada Kota Bandung berpasangan dengan Oded Muhammad Danial yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Dia terpilih menjadi Walikota Bandung 2013-2018.

Ridwan Kamil selalu berinovasi pada tugasnya. Saat menjadi walikota dia banyak melakukan program-program pro rakyat dan membesarkan kembali nama Bandung di kancah internasional. Puncaknya, saat Kota Bandung berhasil menjadi tuan rumah Konferance Asia Africa (KAA) tidak lepas dari sentuhan Ridwan Kamil. Dia sudah banyak mendapat penghargaan atas prestasinya. Kerja keras dan kreasinya tidak sia-sia selama ini.

Ridwan didampingi Uu Ruswanul Ulum yang juga memiliki basis pendukung yang kuat. Pria kelahiran Tasikmalaya, 10 Mei 1969 ini menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya. Uu kecil sekolah di MI Al-Khoriyah dan melanjutkan ke SMP Negeri Manonjaya dan SMA Pasundan Tasikmalaya. Lulus sekolah menengah, Uu meneruskan kuliah di Fakultas Ekonomi Manajemen, Universitas Siliwangi. Selain kuliah, ia juga aktif di berbagai kegiatan kampus maupun luar kampus.

Kegiatan politik ternyata membetot perhatiannya. Kariernya diawali dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1999 saat usianya 30 tahun. Setelah itu, ia menjadi Ketua DPRD Tasikmalaya untuk periode 2004-2009. Tahun 2009, ia kembali menjadi anggota DPRD periode 2009-2011. Pada 2011, saat usianya menginjak 42 tahun, Uu yang memiliki ciri khas dengan memakai Peci serta memiliki hobby bersepeda ini mencoba peruntungannya dengan mengikuti

pemilihan Bupati Tasikmalaya. Saat itu, ia berpasangan dengan Ade Sugianto dan berhasil keluar sebagai pemenang Pilkada Tasikmalaya 2011. Uu dan Ade menjadi Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya untuk periode 2011-2016. Uu kembali terpilih menjadi Bupati Tasikmalaya untuk periode 2016-2021. Uu dan pasangannya, terpilih setelah menjadi calon tunggal dengan meraih 62 persen suara.

Mengusung tagline Jabar Juara Lahir Batin, pasangan calon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum telah menyiapkan visi-misi untuk Jabar 5 tahun ke depan yaitu: 1) Visi: Menghadirkan Jawa Barat Juara Lahir Batin yang Memiliki Manusia Beriman, Bahagia dan Berkualitas, Membangun Ekonomi yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Merata Sejahtera di Desa maupun Kota, serta Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; 2) Misi: a) Menghadirkan Manusia Jawa Barat yang beriman, bertaqwa, serta mendorong peran tempat ibadah sebagai sentra keilmuan dan interaksi sosial; b) Melahirkan manusia Jawa Barat yang Bahagia, Berkualitas, dan Produktif; (c) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Jawa Barat; (d) Membangun infrastruktur wilayah/desa dan kota di Jawa Barat yang mampu mempercepat pertumbuhan dan ekonomi, serta meningkatkan konektivitas baik antarkota/kabupaten di Jawa Barat maupun Jawa Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia (e) Mendorong Daya Saing Ekonomi yang berkelanjutan di Desa dan Kota dan Ekonomi Umat dalam rangka menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Jawa Barat.

Kelima misi yang disebutkan dijabarkan lagi ke dalam lima strategi dan program Emil-Uu. Untuk menerapkan misi yang pertama, pasangan calon ini menitikberatkan keberlanjutan kehidupan pesantren di Jawa Barat. Sementara pada misi keduanya, Emil dan Uu akan

meningkatkan kualitas fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Emil juga memastikan kaum difabel bisa mengakses fasilitas publik dengan mudah. Melalui Misi c, Emil dan Uu ingin mengubah tata kelola pemerintahan dengan penerapan good governance dan memprioritaskan APBD untuk pembangunan manusia dan infrastruktur. Sementara misi d dijabarkan dalam program-program penguatan sektor pertanian dan mengoptimalkan dana desa untuk infrastruktur desa.

Pada misinya yang terakhir, pasangan nomor urut satu ini ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi syariah. Tak hanya itu ia juga ingin mengurangi kemiskinan dengan mendorong wirausaha baru. Dari visi misi yang dijabarkan, Emil dan Uu terlihat ingin menonjolkan potensi desa-desa di Jawa Barat. Tak hanya itu, keduanya juga ingin mengembangkan kualitas masyarakatnya dengan memberi perhatian khusus pada pesantren-pesantren.

Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye oleh pasangan Rindu boleh dibilang sangat maksimal. Pasangan ini mengoptimalkan segala jenis media sosial sebagai sarana kampanye. Mulai dari facebook, twitter dan instagram. Lewat media sosial tersebut pasangan ini berkampanye dengan optimal. Mereka memposting program dan kegiatan mereka bisa lebih dari 10 kali setiap hari. Karena masa kampanye bertepatan dengan bulan Ramadhan maka postingan pasangan ini selalu disisipkan ucapan selamat berpuasa, selamat berbuka puasa dan selamat idul fitri. Setiap postingan itu senantiasa juga disertai *quote* doa-doa.

Pasangan Rindu juga membuat video singkat berdurasi 30 detik tentang program kerja yang mereka janjikan. Video itu diposting setiap hari ke semua media sosial mereka (Facebook, YouTube, Twitter dan Instagram). Gambar 1 (kiri) adalah contoh postingan video Rindu tentang program mereka yang disebut Kredit Mesra, kredit usaha tanpa bunga tanpa agunan yang melibatkan mesjid.

Postingan berupa video yang menceritakan seorang ibu yang mengelola warung kecil yang terbelit utang dari rentenir, Kredit Mesra membebaskan mereka dari belitan utang rentenir.

Sekali-kali Rindwan Kamil memposting video yang bersifat menyerang para kandidat lain, tentang usia. Seperti diketahui, Pilkada Jabar diikuti oleh empat pasangan, tiga pasangan lainnya (TB Hasanuddin-Anton Charliyan, Sudrajat-Syaikhu dan Deddy Miswar-Dedi Mulyadi) rata-rata berusia di atas 60 tahun. Ridwan Kamil dan Uu Ruswanul Ulum berusia di bawah lima puluh tahun sebagaimana ditunjukkan Gambar kanan merupakan video yang menunjukkan dua orang, satu anak muda satu orang tua yang sedang mencuci piring. Yang muda gesit, bertenaga dan cepat menyelesaikan pekerjaan mencuci piring sedangkan yang tua lambat. Dua orang itu adalah representasi calon gubernur Jabar. Tentu saja yang muda adalah representasi Ridwan Kamil dan orang tua adalah representasi para kandidat gubernur lainnya.

**TB Hasanuddin-Anton Charliyan.** Pasangan ini adalah kandidat gubernur-wakil gubernur yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP). Partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini menggenggam 20 kursi di DPRD Jawa Barat. Dengan jumlah itu PDIP tidak perlu berkoalisi dengan partai lain, jumlah itu sesuai dengan syarat UU Pilkada. Latar belakang pasangan ini adalah gabungan purnawirawan TNI-Polri. TB Hasanuddin yang lahir di Majalengka, 8 September 1952 ini merupakan lulusan AKABRI tahun 1974.

Selang setahun, Hasanuddin ditugaskan di Batalyon Kodam Siliwangi hingga 1983. TB Hasanuddin kemudian dipercaya sebagai Instruktur AKABRI Magelang selama 2 tahun, setelah itu ia ditugaskan di Kodam I Aceh hingga 1989. Kariernya kian menanjak. TB Hasanuddin mengajar di SESKOAD Bandung dan

menjadi Komandan Sektor Pasukan Perdamaian PBB di Irak pada 1992 selama setahun. Kemudian, ia ditarik kembali untuk berdinas di Kostrad dan Kodam Jaya. Kariernya makin dekat dengan kekuasaan tatkala menjadi ajudan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Presiden B.J. Habibie. Pada tahun 2001, suami dari Ika Eviolina ini diberi amanah besar sebagai Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Lalu, saat usianya 53 tahun, TB Hasanuddin menjabat sebagai Staf Mabes TNI AD hingga 2009. Pensiun dengan pangkat mayor jenderal, TB Hasanudin bergabung dengan PDI Perjuangan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri. Pada Pemilu 2009, ia menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Kariernya di DPR terbilang moncer. Ia didaulat sebagai wakil ketua Komisi I. Bahkan pada pemilu berikutnya, ia terpilih kembali menjadi anggota dewan periode 2014-2019. Sementara kiprahnya di partai, ia menjabat sebagai Ketua Departemen Politik DPP PDI Perjuangan. Bahkan, pada tahun 2012 TB Hasanuddin dipercaya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat.

Adapun Anton Charliyan adalah perwira tinggi Polri. Saat di calonkan sebagai wakil gubernur jabatan terakhirnya adalah Kapolda Jawa Barat. Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 November 1960 ini banyak bertugas sebagai penyidik di lingkungan reserse Polri. Pada 2000, Anton ikut mengusut kasus pembunuhan Marsinah, buruh yang tewas di Surabaya, Jawa Timur. Ia pernah diberi amanah sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kariernya di reserse berlanjut hingga Mabes Polri. Kali ini, Anton diberi tugas sebagai Kanit III Direktorat I Keamanan dan Kejahatan Transnasional Bareskrim Polri pada tahun 2003 dengan pangkat komisaris besar.

Namanya mencuat ke pentas nasional, saat menjadi Kepala Divisi Humas Polri pada tahun 2015. Tak lama sebagai juru



bicara, ia kembali dikirim ke daerah sebagai Kapolda Sulsel. Sembilan bulan bertugas di Sulsel, ia kembali mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi sebagai Kapolda Jawa Barat pada 12 Desember 2016. Irjen Anton Charliyan menggantikan Irjen Bambang Waskito.

Baru sebulan menjabat Kapolda Jabar, popularitas Anton makin terkenal. Pada bulan Januari 2017, terjadi perseteruan antara ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Ternyata di belakang GMBI ada nama Anton selaku Ketua Dewan Pembina GMBI. Peristiwanya sendiri bermula saat kedatangan Imam besar FPI Habib Rizieq ke Polda Jawa Barat terkait penistaan lambang negara dan disambut oleh massa FPI dan ternyata ormas GMBI juga hadir untuk mendemo FPI. Bentrokan tak terhindarkan dan berujung korban. Saat itu, Anton mengakui sebagai pembina organisasi GMBI dan siap diganti bila salah.

Pada Pilkada Jabar ini kandidat ini menamakan diri Hasanah dengan visi terwujudnya rakyat Jawa Barat makmur berbasis sumber daya alam dan budaya. Adapun misinya adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan manusia Jawa Barat yang bersumberdaya, berdaya saing, berbasis nilai-nilai agama dan budaya.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis keserasian lingkungan dan tata ruang.
3. Mewujudkan Jawa Barat sebagai sumber pangan daerah nasional.
4. Membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan merata.
5. Mewujudkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Secara garis besar terdapat tujuh program yang dijanjikan oleh Hasanah sebagai berikut: 1) *Boga Gawe*. Diartikan ke bahasa Indonesia dari bahasa Sunda yang berarti mempunyai pekerjaan. Sesuai arti harfiahnya, program ini ditargetkan untuk membuka lowongan kerja baru dan

memangkas pengangguran. Targetnya adalah 50 persen pengangguran dapat terangkat dengan program ini; 2) *Jabar Seubeuh*. Sama dengan *Boga Gawe*, program Jabar Seubeuh adalah program yang sama dengan arti harfiahnya, yaitu Jabar Kenyang. Program ini diharapkan dapat memenuhi kecukupan pangan di Jabar; 3) Sekolah gratis. Program sekolah gratis di seluruh Jabar. Program ini diarahkan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, bersumber daya, berdaya saing, dan beretos kerja tinggi dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan; 4) *Imah Reupeug*. Program ini digagas untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga menyediakan ketersediaan tempat tinggal yang layak untuk masyarakat Jabar; 5) *Jabar Cageur*. Program kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat Jabar; 6) *Turkamling*. Program yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur, untuk terjaminnya keamanan, usaha, bisnis dan lingkungan yang mendukung; 7) *Molotot.com*. Program yang sempat ramai karena sering disebut saat debat pilgub Jabar, *molotot.com* adalah program yang pengawasan terhadap aparaturnya yang terintegrasi secara online.

Pasangan ini menggunakan menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Di Twitter Hasanah menggunakan @relawanhasanah. Kampanye tujuh program kerja tersebut dibuat dalam video singkat berdurasi 30 detik yang di-posting twitter relawan Hasanah selama masa kampanye.

**Sudrajat-Ahmad Syaikh.** Pasangan Sudrajat-Syaikh didukung oleh tiga partai yakni Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi yang solid sejak pemilihan presiden 2014. Sudrajat boleh dikatakan tidak awam sekali dalam dunia politik, meskipun Seluruh karirnya diselesaikan di militer. Sosok Sudrajat yang dipilih Gerindra sebenarnya bukan orang baru di

dunia politik Jawa Barat dan tanah air. Kariernya tergolong cemerlang di dunia militer selain di partai politik. Bahkan, sebelum bergabung dengan Gerindra, ia merupakan mantan ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat.

Sudrajat pernah ditunjuk sebagai duta besar di Tiongkok dan menyelesaikan misinya pada 2009. Sekembalinya dari Tiongkok, ia banyak terlibat aktif dalam berbagai organisasi yang mempromosikan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Saat ini, ia bahkan menjabat sebagai Ketua LIC (Lembaga Kerja Sama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indonesia China). Pensiun dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada 2005, jabatan terakhirnya sebagai Dirjen Strategi Pertahanan. Sudrajat lulus dari Akademi Militer pada 1971. Ia mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan baik kemiliteran maupun umum, antara lain Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Lemhanas, beberapa pendidikan militer di Australia dan USA, serta memperoleh gelar Master of Public Administration (MPA) dari Harvard University, AS.

Sementara itu Ahmad Syaikh adalah politisi tulus PKS. Kiprah politik Ahmad dimulai pada 2004 dengan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Belum genap lima tahun duduk di kursi dewan, suami dari Lilik Wakhidah itu mencalonkan diri menjadi Wali Kota Bekasi di pilkada 2008, namun kalah oleh pasangan Mochtar Mohammad-Rahmat Effendi. Setahun berselang, pria lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu kembali menyoal status wakil rakyat di DPRD Jabar periode 2009-2013.

Meski pernah gagal, Syaikh kembali maju memperebutkan kursi pemimpin Kota Bekasi pada 2013 dan menjabat wakil wali kota. Ia mendampingi Rahmat Efendi, yang notabene merupakan rivalnya di Pilkada sebelumnya. Mereka menang dengan perolehan suara 43,87%. Kesuksesan Syaikh, baik di legislatif maupun eksekutif, membuat ayah enam

anak itu dipercaya partainya untuk menepuk jabatan puncak. Ia menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat (DPW PKS Jabar) pada 2015.

Menghadapi Pilkada Jabar pasangan Asyik memiliki misi sebagai berikut: 1) Membangun manusia Jawa Barat yang agamis, sehat, dan unggul; 2) Meningkatkan kesejahteraan melalui penumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berdaya saing berbasis kerakyatan dan potensi lokal; 3) Mengembangkan infrastruktur modern, humanis, dan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan potensi sumber daya alam dan lingkungan; 4) Membangun masyarakat yang bergotong royong, toleran, dan harmoni selaras nilai budaya Jawa Barat yang luhur; 5) melaksanakan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani, dan partisipatif melalui kepemimpinan yang teladan, mengayomi, dan merakyat.

Dalam sesi pertama debat yang terselenggara berkat kerjasama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat dengan Kompas TV dan dipandu oleh Rosianna Silalahi itu, Sudrajat dan Ahmad Syaikh berkesempatan memaparkan visi, misi, dan program mereka di urutan ketiga, sesuai nomor urut pasangan ini. Disampaikan oleh Sudrajat, jika ia dan Ahmad Syaikh terpilih dalam Pilkada Jabar nanti, mereka akan memajukan bidang industri kreatif karena Provinsi Jawa Barat sudah didukung oleh banyak sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Ditambahkan oleh Ahmad Syaikh, salah satu program unggulan dalam Pilkada nanti adalah Jabar Terkoneksi. Artinya, setiap desa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat akan terkoneksi dengan internet jika Sudrajat dan Ahmad Syaikh terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain itu, lanjut pasangan nomor tiga ini, pihaknya juga akan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai lapisan masyarakat, dari pesantren, UMKM

(Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), petani, hingga nelayan apabila terpilih nanti. Secara garis besar, visi dan misi pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhul antara lain: Pertama, membangun manusia Jawa Barat yang Agamis, Sehat, dan Unggul. Kedua, meningkatkan kesejahteraan melalui penumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berdaya saing berbasis kerakyatan dan potensi lokal. Ketiga, mengembangkan infrastruktur modern, humanis, dan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan potensi sumber daya alam dan lingkungan. Keempat, membangun masyarakat yang bergotong royong, toleran, dan harmoni selaras nilai budaya Jawa Barat yang luhur.

Seperti dengan pasangan kandidat lainnya, pasangan "Asyik" juga menggunakan media sosial sebagai sara kampanye, hanya saja tidak semassif dengan kandidat-kandidat lain. Di akun facebook mereka selama masa kampanye tidak ada sama sekali postingan mereka tentang program kerja yang mereka akan lakukan. Postingan Asyik mayoritas video kunjungan mereka ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Pasangan Asyik juga menjadikan pilkada Jabar sebagai ajang kampanye gerakan tagar #2019 ganti Presiden. Gerakan yang diinisiasi oleh politisi PKS Dr. Mardani Ali Sera ini memang mendapat sambutan diberbagai wilayah, meski tak lepas dari berbagai penolakan.

**Deddy Miswar- Dedi Mulyadi.** Pasangan Deddy Miswar-Dedi Mulyadi dicalonkan oleh partai Golkar dan Partai Demokrat. Golkar yang mengantongi 17 Kursi di DPRD Jawa Barat mengajak Partai Demokrat memiliki 12 kursi. Deddy Miswar yang merupakan wakil gubernur petahana didaulat sebagai calon gubernur berpasangan dengan Dedi Mulyadi bupati Kabupaten Purwakarta. Pasangan ini sebenarnya menjajikan mengingat dua tokoh ini adalah tokoh populer di Jawa Barat. Deddy Miswar merupakan aktor

kawakan yang telah membintangi puluhan film dan sinetron dengan segudang penghargaan sebagai pelakon. Sedangkan Dedi Mulyadi, menjabat bupati dua periode dengan segudang prestasi. Pasangan ini maju sebagai kandidat Jabar satu dengan membahwa visi Terwujudnya Jawa Barat yang adil, sejahtera, dan berkarakter tahun 2023. Sedangkan misinya adalah: 1) Mewujudkan tata pemerintahan baik dan bersih melalui reformasi birokrasi; 2) Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang berkualitas, produktif, unggul, dan berkarakter; 3) Mewujudkan tata kelola ruang, infrastruktur, lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan; 4) Mengembangkan potensi daya saing daerah untuk peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan; 5) Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, demokratis dan mandiri.

Visi dan misi ini dijabarkan dalam 9 program kerja yakni: 1) Penyediaan air baku untuk air minum dan irigasi pada setiap daerah rawan air; 2) Penyediaan listrik untuk rakyat pada daerah yang belum terjangkau pelayanan listrik; 3) Penyediaan pangan dan makanan tambahan bergizi untuk daerah rawan pangan dan masyarakat penyandang gizi buruk; 4) Pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemerataan kesempatan layanan pendidikan hingga perguruan tinggi; 5) Pelayanan uji kompetensi, sertifikat keterampilan/keahlian dan pemagangan kerja bagi pencari kerja dan kaum buruh; 6) Pembangunan Puskesmas rawat inap dan penyediaan tenaga medis berdasarkan kebutuhan daerah; 7) Percepatan pertumbuhan wirausaha baru, kemitraan, dan layanan terhadap akses modal; 8) Pertumbuhan ekonomi dengan mendorong daya saing melalui pariwisata berbasis budaya; 9) Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup, dan infrastruktur

termasuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Seperti dengan kandidat-kandidat lain, pasangan ini juga mengoptimasi media sosial sebagai media kampanye, seperti facebook, twitter dan instagram. Kandidat ini mengusung tagline "bekerja untuk melayani" sehingga seluruh akun media sosial "bekerja untuk melayani." Namun bila diperhatikan lebih jauh, akun pribadi facebook, instagram dan twitter dari Deddy Miswar dan Dedi Mulyadi jauh lebih populer dari pada akun resmi mereka. Pasangan kandidat ini menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye mensosialisaikan program-program kerja mereka guna menggali dukungan. Namun kandidat ini lebih sedikit mem-posting program-program kerja mereka di bandingkan dengan pasangan Rindu. Satu minggu sebelum hari pencoblosan pasangan ini mewarnai status-status akun media sosial mereka dengan himbaun memilih kandidat pasangan no 4.

## PEMBAHASAN & KESIMPULAN

Dalam konsep komunikasi politik, terdapat empat tingkatan hirarkis seseorang dipilih dalam tahapan pemilu. Pertama "dikenal" dalam artian pemilih mengingat namanya, mengenal wajah kandidat. Kedua "disukai" setelah dikenal tahapan selanjutnya adalah apakah pemilih menyukai kandidat tersebut. Tidak semua kandidat yang dikenal tersebut disukai oleh pemilih. Bila kandidat sudah disukai maka tahapan inilah kandidat bisa mengukur populasitasnya. Tahapan ke tiga adalah didukung, tahapan ini lebih tinggi dari dari sekedar disukai. Pada tahap ini survei biasanya mengukur elektabilitas kandidat dengan bertanya "bila peilkada hari ini dilaksanakan maka siapa yang ada pilih?" tahapan ke empat adalah dipilih. Inilah tahapan paling tinggi dalam proses Pilkada.

Pemilu atau Pilkada yang dilaksanakan pasca reformasi semua menggunakan Pemilu modern yang di

dalam mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terukur. Pemakaian metode ilmu pengetahuan pada pilkada Jabar terlihat pada pembentukan positioning masing-masing kandidat. Istilah positioning pertama kali dipopulerkan oleh Al Ries dan Jack Trout. Keduanya merupakan praktisi periklanan, yang menulis buku berjudul *Positioning; The Battle fot your mind*, tahun 1982. Mereka mengartikan positioning sebagai tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas (diantara pesaing) di dalam benak pelanggan sasaran. Hasil akhir dari penempatan posisi adalah keberhasilan penciptaan posisi nilai yang berfokus pada pelanggan, yaitu alasan yang meyakinkan mengapa pasar sasaran harus membeli produk tersebut.

Dalam konteks pemasaran politik (*political marketing*) positioning bermakna bagaimana seorang kandidat atau partai politik merancang tawaran dalam benak pemilih sehingga menempati posisi yang khas dalam benak pemilih. Dalam strategi positioning, tiap-tiap (produk, merek, perusahaan dan kandidat atau partai politik) berusaha keras untuk berada pada posisi paling atas dalam benak publik (*top mind*). Misalnya ketika ditanya, partai apa yang paling besar di Indonesia, jawabannya adalah Partai Golkar. Bagi kandidat terdapat tiga pilihan dalam melakukan strategi positioning:

*Pertama*, memperkuat posisi dirinya saat ini yang ada dalam benak konsumen. inilah misanya dilakukan oleh Ridwan Kamil-Uu Riswanul Ulum, Ridwan Kamil yang selalu berada di posisi nomor satu pada setiap hasil-hasil polling popularitas. Ridwan Kamil mengambil tag line "Rindujabarjuara1" Juara satu pada tagline adalah representasi dari nomor urut satu sekaligus nomor satu pada hasil polling2 Pilkada Jabar.

*Kedua*, mencari dan merebut posisi baru yang belum ditempati. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh TB Hasanuddin-Anton Charliyan. TB

Hasanuddin mengeluarkan jargon melotot.com. melotot.com adalah sebuah gerakan untuk mengawasi jalannya pembangunan melalui aplikasi melotot.com yang akan dilakukan oleh Hasanah bila terpilih. Sebagaimana kita ketahui bahwa transparansi adalah kunci menangkal korupsi. Saat yang sama kandidat lain belum melakukan hal tersebut.

Selain positioning juga diperlukan memorizing. *Memorizing* menuntut kemampuan publik untuk selalu mengingat apa yang di-positioning oleh seseorang dan partai politik. Tidak ada gunanya positioning yang baik, bila tidak tertanam dalam benak publik. Bila kita berbicara tentang memorizing, maka tidak bisa melepaskan dari paradigma kognitif dan proses informasi (*cognition and information processing*). Paradigma ini berasumsi misalnya bagaimana kita berfikir, bagaimana kita menata dan menyimpan informasi serta bagaimana pengetahuan membentuk perilaku. Selain pendekatan *cognition and information processing* terdapat pendekatan lain yang disebut *Information integration*. Pendekatan ini bermakna adalah cara kita menghitung dan menata informasi tentang seseorang, objek, situasi dan ide ke dalam bentuk sikap. Informasi sesungguhnya memiliki potensi untuk mempengaruhi system kepercayaan seseorang atau pendirian seseorang. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan pendirian; *Valence* (menyangkal) dan *Weight* (bobot). *Valence* merujuk pada apakah informasi yang kita terima mendukung kepercayaan atau bahkan bertentangan dengan kepercayaan kita. Bila informasi yang kita terima mendukung kepercayaan kita, maka informasi itu disebut sebagai *positive valence*, bila tidak maka disebut *negative valence*. Sedangkan *Weight* (bobot) berfungsi sebagai menilai kredibilitas sebuah informasi. Bila kita menganggap sebuah informasi benar, maka bobot kredibilitasnya tinggi, begitu juga sebaliknya.

Sebagaimana diketahui hasil Pilkada Jabar 2018 sudah kita ketahui pemenangnya adalah pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dengan perolehan suara sah sebanyak 7.226.254 (32,88 persen). Mungkin kemenangan ini tidak terlepas dari kampanye politik mereka di media sosial dan sebagai kesimpulan dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye politik Pilkada Jabar menunjukkan bahwa mulai terjadi pergeseran penggunaan media kampanye. Jika pada tahun-tahun sebelumnya televisi menjadi media utama kampanye kini, televisi sudah mulai ditinggalkan. Iklan politik televisi memang masih ada tapi jumlahnya sudah minim. Kedua, kampanye di media sosial boleh dikatakan dapat mewujudkan demokrasi yang deliberatif karena keramaian ide, gagasan, dan visi-misi terasa mulai berpindah ke ruang-ruang maya. Diskusi, perdebatan, bahkan saling tuduh secara frontal begitu bebas terjadi di berbagai media sosial. Ketiga Untuk kalangan terdidik, kampanye menggunakan media sosial lebih efektif ketimbang baliho dan spanduk. Orang yang relatif terdidik dan *well inform* tidak akan percaya isi baliho atau spanduk, tapi lebih percaya pada perkataan teman atau koleganya di media sosial. Di sini dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat berpengaruh bagi orang lain.

#### REFERENSI

- Afdal Makkuraga Putra (2011) *Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Prov. Banten 2011*, Jurnal Ultimacom; UNM Volume 3 No: 2/ 2011
- Afdal Makkuraga Putra, (2008) *Etika dan Iklan Politik Televisi Pilkada DKI Jakarta 2007 (Studi Kasus Persoalan Etika Iklan Politik Televisi Dua Pasangan Kandidat Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo-Prijanto dan Adang Dorajatun-Dani Anwar)*, Tesis Universitas Indonesia.

- Budiardjo, Meriam (2010) *Pengantar Ilmu Politik*, Kompas Gramedia; Jakarta.
- Diana C. Mutz (2001), *The Future of Political Communication Research: Reflections on Occasion of Steve Chaffee's Retirement from Stanford University*, Taylor & Francis Journal 18:231–236, 2001.
- Hardiman, Budi F, (2010), *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokrasi" dari Polis sampai Cyberspace*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Irman Lanti, Afdal Makkuraga Putra dan Ali Yusuf (2006), *Pemekaran Wilayah : Dilema Antara Kebutuhan dan Permainan Politik*, Jurnal Demokrasi dan HAM The Habibie Centar, Volume 6 No:2.
- Kaid, Lynda Lee (2004) *Handbook of Political Communication Research*, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London.
- Kees Brants,(2005), *Guest Editor's Introduction: The Internet and the Public Sphere* , Taylor & Francis Inc: 22:143–146
- Lawrence, W Newman (2003) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. A and B Publisher : Boston
- McNair, Brian, (2003) *An Introduction to Political Communication*, Routledge: London & USA
- McQuail, Dennis (2005) *McQuail's Mass Communications Theory*, Sage Publication: London
- Moleong, Lexi, (2003) *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mulyana, Dedy (2003), *Metologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi & Ilmu Sosial lainnya*. Remaja Rosdakarya; Bandung
- Nasution, Zulkarimen (1990), *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Zittel, Thomas (2004), *The Internet, Democracy and Participation*, dalam *Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges* Editor: Frank Esser dan Barbara Pfetsch, Cambridge University Pres: London.
- Zuhro, Siti (2009) *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*. Penerbit Ombak; Yogyakarta.